

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritis

1. Tinjauan Umum Tentang Pemahaman Siswa

a. Pengertian Pemahaman Siswa

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan gambaran mengenai pengertian pemahaman agar dapat memperjelas permasalahan yang akan dibahas.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pemahaman adalah proses perbuatan memahami atau memahamkan (Depdikbud, 1997:74).

Pemahaman berasal dari kata “paham” yang berarti mengerti benar tentang sesuatu hal. Definisi tersebut dikatakan tidak bersifat operasional sebab tidak memperlihatkan perbuatan psikologis yang diambil seseorang jika ia memahami. Sedangkan pemahaman yang bersifat operasional diartikan sebagai melihat suatu hubungan ide tentang suatu persoalan. Hal terpenting dalam proses pembelajaran ialah agar siswa mampu memahami sesuatu berdasarkan pengalaman belajarnya.

Menurut Jalaluddin Akhmat (1997:33) “pemahaman adalah aspek intelektual yang berkaitan dengan apa yang diketahui manusia”. Dengan

demikian dapat dikatakan bahwa pemahaman erat kaitannya dengan aspek intelektual manusia untuk mengetahui apa, mengapa, dan bagaimana sesuatu itu dapat diterima dan dimengerti akal pikiran.

Menurut Mulyasa (2005:78) menyatakan bahwa “pemahaman adalah kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki oleh individu”. Selanjutnya Ernawati (2003:8) berpendapat bahwa “yang dimaksud dengan pemahaman adalah kemampuan menangkap pengertian-pengertian seperti mampu mengungkapkan suatu materi yang disajikan dalam bentuk lain yang dapat dipahami, mampu memberikan interpretasi dan mampu mengklasifikasikannya”.

Virlianti (2002:6) mengemukakan bahwa “pemahaman adalah konsepsi yang bisa dicerna atau dipahami oleh peserta didik sehingga mereka mengerti apa yang dimaksudkan, mampu menemukan cara untuk mengungkapkan konsepsi tersebut, serta dapat mengeksplorasi kemungkinan yang terkait”.

Terkait dengan pendapat di atas, pemahaman menurut Suharsimi (2009:118) adalah “bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga (*estimates*), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan”.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman adalah kemampuan menangkap pengertian-pengertian melalui proses perbuatan memahami atau memahamkan suatu hubungan ide tentang

suatu persoalan yang berkaitan dengan aspek intelektual manusia untuk mengetahui apa, mengapa, dan bagaimana sesuatu itu dapat diterima dan dimengerti akal pikiran.

Diantara komponen terpenting dalam pendidikan adalah peserta didik (siswa) dalam perspektif pendidikan peserta didik merupakan subjek dan objek pendidikan. Dalam banyak pustaka subjek didik disebut anak didik (siswa) karena program pendidikan tidak hanya diperuntukkan bagi anak-anak saja, melainkan juga orang dewasa. Dalam kajian ini menggunakan istilah siswa yaitu siapa saja yang menjadi sasaran dalam proses pendidikan.

Pandangan yang lebih modern anak didik tidak hanya dianggap sebagaimana disebutkan di atas, melainkan juga diperlakukan sebagai subjek pendidikan. Hal ini dilakukan dengan cara melibatkan mereka dalam memecahkan masalah dalam proses belajar mengajar.

Tanpa peserta didik (siswa), maka pendidikan tidak akan terlaksana. Untuk itulah memerlukan pemahaman yang komprehensif kepada peserta didik dengan pemahaman tersebut akan membantu pendidik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melalui berbagai aktifitas pendidikan. Di bawah ini merupakan deskripsi tentang peserta didik (siswa), yaitu :

1. Siswa adalah orang yang belum dewasa yang mempunyai sejumlah potensi dasar yang masih bisa berkembang
2. Siswa adalah manusia yang memiliki diferensiasi periodisasi perkembangan dan pertumbuhan

3. Siswa adalah makhluk yang memiliki perbedaan individual, baik yang disebabkan oleh faktor pembawaan maupun lingkungan dimana ia berada.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat diberi pengertian siswa sebagai individu memiliki hak dan wewenang untuk menilai suatu objek. Pemahaman siswa diartikan sebagai pendapat siswa terhadap objek tertentu berdasarkan indikator pengetahuan dan pengalamannya tentang suatu persoalan untuk dicerna atau dipahami oleh peserta didik sehingga mereka mengerti apa yang dimaksudkan, mampu menemukan cara untuk mengungkapkan konsepsi tersebut, serta dapat mengeksplorasi kemungkinan yang terkait.

2. Tinjauan Tentang Ideologi Pancasila

a. Pengertian Ideologi

Ideologi berasal dari kata idea (Inggris), yang artinya gagasan, pengertian. Dalam pengertian sehari-hari menurut Kaelan 'idea' disamakan artinya dengan cita- cita. Dalam perkembangannya terdapat pengertian Ideologi yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Istilah Ideologi pertama kali dikemukakan oleh Destutt de Tracy seorang Perancis pada tahun 1796. Menurut Tracy ideologi yaitu '*science of ideas*', suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional dalam masyarakat Perancis.

Ideologi adalah ajaran atau ilmu tentang gagasan dan buah pikiran (*Science des ideas*).

Di dalam ensiklopedi populer Politik Pembangunan Pancasila, ideologi merupakan cabang filsafat yang mendasari ilmu-ilmu seperti pedagogi, etika, dan politik.

Ideologi dalam arti praktis, ialah kesatuan gagasan-gagasan dasar yang disusun secara sistematis dan dianggap menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya, baik yang individual maupun sosial.

Menurut Padmo Wahjono (pakar hukum tata negara), “ideologi merupakan suatu kelanjutan atau konsekuensi daripada pandangan hidup bangsa, falsafah hidup bangsa, dan akan berupa seperangkat tata nilai yang dicita-citakan akan direalisasikan di dalam kehidupan berkelompok”.

Menurut Mubyarto (pakar ekonomi), “ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman karya (atau perjuangan) untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa”.

Menurut M. Sastrapratedja (pakar budaya), “ideologi ialah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisir suatu sistem yang teratur”.

Dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan seperangkat gagasan atau pemikiran yang merupakan suatu kelanjutan atau konsekuensi daripada pandangan hidup bangsa yang berorientasi pada tindakan yang diorganisir

suatu sistem yang teratur yang menjadi pegangan dan perjuangan yang dicita-citakan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa.

Ideologi mengandung kegunaan untuk memberikan stabilitas arah dalam hidup berkelompok dan sekaligus memberikan dinamika gerak menuju tujuan masyarakat atau bangsa.

b. Penerapan Ideologi

Menurut Dadang Sundawa, dkk (2008 : 4) “Ideologi merupakan cerminan cara berfikir orang atau masyarakat yang sekaligus membentuk orang atau masyarakat itu menuju cita-citanya. Ideologi merupakan sesuatu yang dihayati menjadi suatu keyakinan.

Ideologi merupakan suatu pilihan yang jelas membawa komitmen (keterikatan) untuk mewujudkannya. Semakin mendalam kesadaran ideologis seseorang, maka akan semakin tinggi pula komitmennya untuk melaksanakannya. Komitmen itu tercermin dalam sikap seseorang yang meyakini ideologinya sebagai ketentuan yang mengikat, yang harus ditaati dalam kehidupannya, baik dalam kehidupan pribadi ataupun masyarakat.

Ideologi berintikan seperangkat nilai yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh seseorang atau suatu masyarakat sebagai wawasan atau pandangan hidup mereka. Melalui rangkaian nilai itu mereka mengetahui bagaimana cara yang paling baik, yaitu secara moral atau normatif dianggap benar dan adil, dalam bersikap

dan bertingkah laku untuk memelihara, mempertahankan, membangun kehidupan duniawi bersama dengan berbagai dimensinya. Pengertian yang demikian itu juga dapat dikembangkan untuk masyarakat yang lebih luas, yaitu masyarakat bangsa”.

Ideologi dalam kehidupan kenegaraan dapat diartikan sebagai suatu konsensus mayoritas warga negara tentang nilai-nilai dasar yang ingin diwujudkan dengan mendirikan negara. Dalam hal ini sering juga disebut *Philosophische Grondslag* atau *Weltanschauung* yang merupakan pikiran-pikiran terdalam, hasrat terdalam warga negaranya, untuk di atasnya didirikan suatu negara.

c. Pancasila Sebagai Ideologi

Pancasila sebagai ideologi mencerminkan seperangkat nilai terpadu dalam kehidupan politiknya bangsa Indonesia, yaitu sebagai tata nilai yang dipergunakan sebagai acuan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Semua gagasan-gagasan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini di tata secara sistematis menjadi satu kesatuan yang utuh.

Sebagai ideologi, Pancasila berlaku sebagai pedoman dan acuan dalam menjalankan aktivitas di segala bidang, dan karena itu sifatnya harus terbuka, fleksibel, dan tidak bersifat tertutup maupun kaku, yang akan menyebabkan ketinggalan zaman.

Pancasila sebagai sumber nilai mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah, penyelenggara negara, termasuk pengurus partai dan golongan fungsional untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita moral rakyat yang luhur.

Pancasila mengarahkan pembangunan agar selalu dilaksanakan demi kesejahteraan umat manusia dengan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa dan keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Pembangunan disegala bidang selalu mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa Indonesia. Seperti yang dikemukakan Soeharto (1967:10), yaitu:

“Pancasila adalah kepribadian kita, adalah pandangan hidup seluruh Bangsa Indonesia, pandangan hidup yang disetujui oleh wakil-wakil rakyat, menjelang dan sesudah Proklamasi kemerdekaan kita. Oleh karena itu, Pancasila adalah satu-satunya pandangan hidup yang dapat pula mempersatukan kita.”

Arifin (1990:13) mengemukakan bahwa: “Pancasila adalah falsafah atau pandangan hidup, jiwa serta tujuan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Proklamasi Republik Indonesia oleh karena ia telah ditetapkan oleh wakil rakyat dalam PPKI pada tahun 1945.”

Berdasarkan penjabaran di atas, Pancasila sebagai ideologi dapat dikatakan sebagai falsafah atau pandangan hidup seluruh bangsa Indonesia yang berlaku sebagai pedoman dan acuan dalam menjalankan aktivitas di segala bidang dan sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia.

3. Tinjauan Tentang Sikap Moral

a. Pengertian Sikap Moral

Manusia sebagai makhluk Tuhan yang sempurna dibekali akal dan pikiran yang dimaksudkan agar berguna untuk mengatur tata kehidupan dalam bersikap dan berperilaku. Persepsi anak tentang ideologi Pancasila dapat berpengaruh pada sikap anak dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks sikap umumnya akan terlintas dalam benak kita bahwa sikap berkaitan dengan hal-hal yang menunjukkan tindakan baik atau buruk yang dilakukan seseorang.

Menurut Thurstone dalam Bimo Walgito (2003 : 109) “sikap adalah suatu tingkat afeksi baik yang bersifat positif maupun negatif dalam hubungannya dengan objek-objek psikologis. Afeksi yang positif yaitu afeksi senang, sedangkan afeksi yang negatif adalah afeksi yang tidak menyenangkan”.

Sri Utami Rahayuningsih (2008 : 1) sikap (*attitude*) adalah :

1. Berorientasi kepada respon

Sikap adalah suatu bentuk dari perasaan, yaitu perasaan mendukung atau memihak (*favourable*) maupun perasaan tidak mendukung (*unfavourable*) pada suatu objek.

2. Berorientasi kepada kesiapan respon

Sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu, apabila dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon ; suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif untuk menyesuaikan diri dari situasi sosial yang telah terkondisikan.

3. Berorientasi kepada skema triadic

Sikap merupakan konstelasi komponen-komponen kognitif, afektif, dan konatif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek di lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap merupakan bentuk perasaan yang merupakan kesiapan untuk bereaksi pada suatu tingkat afeksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek yang menghendaki adanya respon dengan cara-cara tertentu yang dipilihnya.

Dalam Kamus Purwodarminto moral berarti ajaran tentang baik buruknya perbuatan dan kelakuan (akhlak dan kewajiban).

Menurut Suganda Purwacaraka dalam M. Daryono (1998 : 50) “moral diartikan sebagai suatu istilah untuk menentukan batas dari sifat-sifat, corak-corak, maksud-maksud, pertimbangan-pertimbangan, atau perbuatan-perbuatan yang secara layak dinyatakan baik/buruk, benar/salah”.

Menurut Burhanuddin Salam (2000 : 2) “moral mempunyai pengertian yang sama dengan kesusilaan, memuat tentang ajaran tentang baik buruknya perbuatan. Jadi, perbuatan itu dinilai sebagai perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk. Penilaian itu menyangkut perbuatan yang dilakukan dengan disengaja. Memberikan penilaian atas perbuatan yang disebut penilaian etis atau moral”.

Berdasarkan pendapat di atas, moral dapat diartikan sebagai suatu istilah atau ajaran yang berkaitan dengan kesusilaan untuk menentukan baik atau buruk, benar ataupun salah dari suatu perbuatan yang disengaja.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap moral adalah segala perbuatan individu yang berkaitan dengan kesusilaan tentang baik buruknya perbuatan dan kelakuan individu yang berupa reaksi terhadap sesuatu yang datang baik dari dalam maupun luar diri individu itu sendiri.

b. Teori-Teori Perkembangan Moral

1. Teori Perkembangan Moral Lawrence Kohlberg

Menurut Kohlberg, tahap pemahaman berlangsung dalam suatu urutan yang invariant, walaupun kecepatannya bervariasi. Selain itu

Kohlberg juga berpendapat bahwa perkembangan moral merupakan suatu hasil manusia. Bagi Kohlberg moral dibatasi oleh suatu konstruk lain yang disebut pertimbangan. Berdasarkan pertimbangan, seseorang melakukan perbuatan. Lawrence Kohlberg mengidentifikasi pemahaman nilai moral dalam tiga taraf, yaitu :

a. Taraf Pra Konvensional

Tahap 1. Orientasi hukuman dan kepatuhan

Pertimbangan moral berorientasi pada objek dan peristiwa konkrit bersifat fisik serta ketakutan dan hukuman apabila melanggar suatu peraturan.

Tahap 2. Orientasi relativitas instrumental

Hubungan antar manusia dianggap sebagai hubungan jual beli di pasar yang merupakan hubungan timbal balik, misalnya : saya menolong kamu, kalau kamu menolong saya. Jadi, tindakan yang dianggap benar adalah tindakan yang diibaratkan alat yang dapat memenuhi kebutuhan sendiri atau kadang-kadang juga memenuhi kebutuhan orang lain.

b. Taraf Konvensional

Tahap 1. Orientasi masuk kelompok orang baik

Dalam tahap ini orientasi dari tindakan individu adalah agar ia mendapat dukungan dan ia dapat dikatakan baik oleh orang lain.

Sehingga moral adalah tingkah laku yang menyenangkan membantu atau tindakan-tindakan yang diakui dan diterima orang lain.

Tahap 2. Orientasi hukum dan ketertiban

Individu menilai bahwa perbuatan baik adalah perbuatan yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada dalam masyarakat. Pembuat peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan dan pemeliharaan ketertiban sosial dijunjung tinggi pada tahap ini.

c. Taraf Pasca Konvensional

Tahap 1. Orientasi kontrak sosial legalitas

Dalam tahap ini orang mengartikan benar salahnya suatu perbuatan berdasarkan atas hak-hak individu dan norma-norma yang telah teruji dalam masyarakat.

Tahap 2. Orientasi yang mendasarkan atas prinsip dan koefisien sendiri

Peraturan dan norma adalah subjektif, begitu pula batasan-batasannya adalah tidak pasti. Dengan demikian maka ukuran penilaian tingkah laku moral adalah koefisien orang itu sendiri prinsipnya sendiri lepas dari segala norma yang ada. Kohlberg memandang prinsip ini sebagai prinsi moral universal, suatu

norma moral yang dasarnya ada di dalam koefisien orang itu sendiri.

2. Teori Perkembangan Moral Sigmund Frued

Dalam mengembangkan pendekatannya mengenai masalah kepribadian, Frued bertolak pada anggapan dasar bahwa ada sistem energi yang tumbuh dan berkembang dalam diri manusia. Interaksi ketika energi itulah yang olehnya dianggap paling bertanggungjawab atas perkembangan karakter dan moralitas seseorang. Ketiga sistem energi itu adalah Id, Ego dan Super Ego.

Id adalah wadah dalam jiwa seseorang yang berisikan dorongan-dorongan primitive yang disebut Primitive Drives. Ego bertugas melaksanakan dorongan-dorongan dari Id dan Ego harus menjaga benar bahwa dorongan primitive tidak bertentangan dengan kenyataan dan tuntutan dari Super Ego. Super Ego adalah sistem kepribadian yang ketiga dalam diri seseorang yang berisi kata hati.

3. Teori Perkembangan Moral Piaget

Piaget menyatakan bahwa kesadaran moral anak akan mengalami perkembangan dari satu tahap ketahap yang lebih tinggi. Berikut ini pemahaman nilai moral menurut Piaget dibagi menjadi empat tahap, yaitu :

Tahap pertama, anak-anak pada umur 2 tahun merupakan motor activity.

Tahap kedua, pada umur 2 sampai 6 tahun dia meniru apa yang dilihatnya semata-mata demi tujuannya sendiri.

Tahap ketiga, pada umur 7 sampai 10 tahun tampak bahwa sikap heteronom mulai berkurang dan sikap otonom mulai tumbuh.

Tahap keempat, antara umur 11 sampai 12 tahun kemampuan anak untuk berfikir abstrak mulai berkembang. Peraturan-peraturan dianggap sebagai hukum yang merupakan kesepakatan bersama dan dapat diubah kalau disepakati oleh umum.

4. Tinjauan Tentang Nilai-Nilai Pancasila

1. Pengertian Nilai

Menilai berarti menimbang yaitu kegiatan manusia menghubungkan sesuatu dengan sesuatu untuk selanjutnya mengambil keputusan. Keputusan nilai dihubungkan dengan unsur-unsur yang ada pada manusia yaitu jasmani, cipta, rasa, karsa dan kepercayaan. Keputusan nilai dapat mengatakan berguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, serta religius atau tidak religius.

Sesuatu dikatakan mempunyai nilai apabila sesuatu itu berguna, benar (nilai kebenaran), indah (nilai estetis), baik (nilai moral atau etis), religius (nilai agama).

Menurut Notonagoro dan Darji Darmodiharjo, dkk (1991 : 51) membagi nilai menjadi tiga, yaitu :

a. Nilai material

Yaitu segala sesuatu yang berguna bagi semua unsur manusia.

b. Nilai vital

Yaitu segala sesuatu yang berguna bagi semua unsur manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas.

c. Nilai kerohanian

Yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia.

Nilai kerohanian ini dapat dibedakan atas empat macam, yaitu :

- a. Nilai kebenaran atau kenyataan yang bersumber pada unsur akal manusia (rasio, budi, cipta)
- b. Nilai keindahan yang bersumber pada unsur rasa manusia (*geovel*, perasaan, *aesthetis*)
- c. Nilai kebaikan atau nilai moral yang bersumber pada unsur kehendak atau kemauan manusia (*will*, karsa, *ethic*)
- d. Nilai religius yang merupakan nilai ketuhanan, kerohanian yang tertinggi dan mutlak. Nilai religius ini bersumber pada kepercayaan atau keyakinan manusia.

2. Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Pancasila

Menurut Darji Darmodiharjo, dkk (1991 : 52) nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila antara lain sebagai berikut :

1. Dalam sila I berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” terkandung nilai-nilai religius antara lain :

- a. Keyakinan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa dengan sifat-sifatnya Yang Maha Sempurna, yakni Maha Kasih, Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Bijaksana dan lain-lain sifat yang suci.
 - b. Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yakni menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala Larangan-Nya.
 - c. Nilai sila I ini meliputi dan menjiwai sila II, III, IV dan V.
2. Dalam sila II yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” terkandung nilai-nilai kemanusiaan, antara lain :
 - a. Pengakuan terhadap adanya martabat manusia
 - b. Perlakuan yang adil terhadap sesama manusia
 - c. Pengertian manusia yang beradab yang memiliki daya cipta, rasa, karsa, dan keyakinan sehingga jelas adanya perbedaan antara manusia dan hewan.
 - d. Nilai sila II ini diliputi dan dijiwai sila I, meliputi dan menjiwai sila III, IV dan V.
3. Dalam sila III yang berbunyi “Persatuan Indonesia” terkandung nilai persatuan bangsa, antara lain :
 - a. Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia.
 - b. Bangsa Indonesia adalah persatuan suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia.
 - c. Pengakuan terhadap ke-“Bhineka Tunggal Ika”-an suku bangsa (etnis) dan kebudayaan bangsa (berbeda-beda namun satu jiwa) yang memberikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa.

- d. Nilai sila III ini diliputi dan dijiwai sila I dan II, meliputi dan menjiwai sila IV dan V.
4. Dalam sila IV yang berbunyi “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan” terkandung nilai kerakyatan, antara lain :
- a. Kedaulatan negara adalah ditangan rakyat.
 - b. Pemimpin kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat.
 - c. Manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
 - d. Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat.
 - e. Nilai sila IV diliputi dan dijiwai sila I, II dan III, meliputi dan menjiwai sila V.
5. Dalam sila V yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” terkandung nilai keadilan sosial, antara lain :
- a. Perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial atas kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia.
 - b. Keadilan dalam kehidupan sosial terutama meliputi bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan dan pertahanan keamanan nasional.
 - c. Cita-cita masyarakat adil, makmur, material dan spiritual, yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

- d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban dan menghormati hak orang lain.
- e. Cinta akan kemajuan dan pembangunan.
- f. Nilai sila V ini diliputi dan dijiwai sila I, II, III dan IV.

Menurut H.A.W. Widjaja (2004 : 6), Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara mengandung nilai-nilai sebagai berikut :

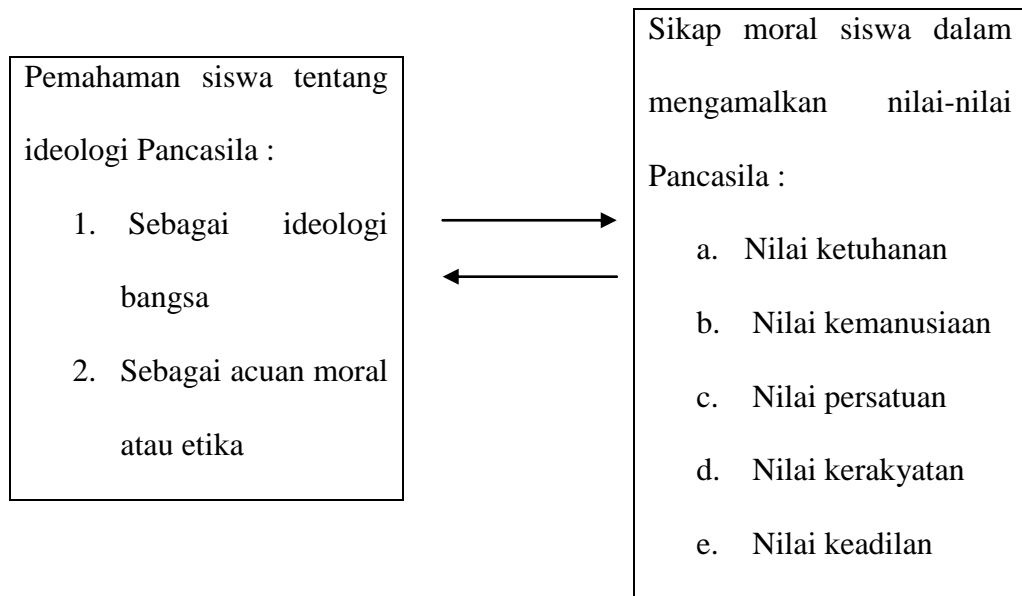
- a. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan.
- b. Nilai ideal, nilai material, nilai spiritual, nilai pragmatis dan nilai positif.
- c. Nilai etis, nilai estetis, nilai logis, nilai sosial dan nilai religius.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa nilai-nilai Pancasila adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dimana nilai ketuhanan merupakan nilai inti yang meliputi dan menjiwai seluruh nilai kehidupan yang bertujuan membentuk sikap positif manusia sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

B. Kerangka Pikir

Setelah dilakukan penguraian terhadap beberapa pengertian dan konsep yang akan membatasi masalah penelitian ini, maka kerangka pikir merupakan instrumen yang memberikan penjelasan bagaimana upaya penulis memahami pokok masalah.

Untuk memperjelas gambaran penelitian ini maka digambarkan dalam diagram kerangka pikir berikut ini :



Gambar 1 : Diagram Kerangka Pikir

C. Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut :

1. Ada pengaruh pemahaman ideologi Pancasila terhadap sikap moral.
2. Semakin tinggi tingkat pemahaman siswa tentang ideologi Pancasila maka semakin baik pula sikap moralnya.